

ABSTRAK

Vietnam sebagai salah satu negara di kawasan ASEAN memiliki berbagai faktor kompleks yang mendorong terjadinya permasalahan perdagangan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Vietnam dalam mengatasi perdagangan manusia pada periode 2017-2021 berdasarkan teori pendekatan strategi anti perdagangan manusia (*anti-trafficking strategy*), dengan menggunakan metode kualitatif. Strategi anti perdagangan manusia menekankan empat pendekatan dalam mengatasi perdagangan manusia. Hasil penelitian menunjukkan upaya Pemerintah Vietnam dalam periode 2017-2021 mengimplementasikan strategi anti perdagangan manusia melalui kebijakan pencegahan dan mengatasi akar penyebab, penguatan dan penegakan hukum, perlindungan korban, serta menjalin kemitraan. Dalam upaya tersebut pemerintah juga berfokus pada upaya perlindungan korban dengan menyediakan layanan penyelamatan, pemulihan, pendidikan, dan peningkatan kemampuan ekonomi bersama dengan lembaga swadaya masyarakat. Terdapat kemajuan dalam pembentukan kebijakan dan penekanan jumlah korban. Di satu sisi terdapat tantangan seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya konsistensi aparat penegak hukum menjadi hambatan dalam mengatasi perdagangan manusia secara menyeluruh.

Kata Kunci: Perdagangan manusia; Vietnam; strategi anti perdagangan manusia; upaya pemerintah; LSM

ABSTRACT

Vietnam, as one of the countries in the ASEAN region, has various complex factors that drive the occurrence of human trafficking issues. This research aims to analyze the efforts of the Vietnamese Government in addressing human trafficking during the period 2017-2021 based on the theory of the anti-trafficking strategy, using qualitative methods. The anti-trafficking strategy emphasizes four approaches in addressing human trafficking. Research results show the efforts of the Vietnamese Government during the 2017-2021 period in implementing an anti-human trafficking strategy through prevention policies and addressing root causes, strengthening and enforcing the law, victim protection, and building partnerships. In these efforts, the government also focuses on victim protection by providing rescue, recovery, education, and economic empowerment services in collaboration with non-governmental organizations. There has been progress in policy formation and the emphasis on the number of victims. On one hand, there are challenges such as the lack of coordination between the central government and regional authorities, limited resources, and the inconsistency of law enforcement officers, which become obstacles in comprehensively addressing human trafficking.

Keywords: Human trafficking; Vietnam; anti-trafficking strategy; government efforts; NGOs